



Judul : DPR paling transparan dalam proses penganggaran
Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

PERINGKAT TERBAIK SE-ASEAN

DPR Paling Transparan dalam Proses Penganggaran

Jakarta, Pelita

Proses penganggaran DPR RI mendapat nilai terbaik diatas negara-negara ASEAN. Penilaian itu diperoleh dari survei Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and Deutsche Gesellschaft für International (GIZ).

"Ini adalah penilaian yang sangat transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam diskusi Dialektika Demokrasi "Presentasi Hasil Survei Lembaga se Asean", Kamis (10/8) di Media Center DPR Senayan Jakarta.

Dari penilaian itu pagu anggaran yang diberikan pemerintah kepada DPR untuk tahun anggaran 2018 menjadi Rp 5,7 triliun lebih. Jumlah tersebut lebih besar dari pagu indikatif. Mendapat tambahan sebesar Rp 1.370.578.457.000,00.

Berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor:S-593/MK.02/2017 dan 291/M. PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018, DPR RI, memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp5.728.286.667.000,00 atau dibanding pagu indikatif.

Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) itu juga menegaskan institusi yang dia pimpin merupakan bagian dari infrastruktur yang mampu memberikan manfaat sangat luar biasa bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. "DPR adalah infrastruktur yang juga untuk kemajuan rakyat," kata dia.

Lebih jauh ditegaskannya DPR tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, membuat undang-undang (legislasi) dan membahas anggaran (Budgeting), tapi juga telah menjelma menjadi demokrasi lebih berkualitas.

Menurut Fahri, semakin demokratis suatu negara, maka semakin besar pula keterlibatan parlemen dalam menentukan anggaran negara. Namun DPR belum sampai ketahap itu, karena masalah penganggaran negara masih terpusat di eksekutif.

Fahri juga menjelaskan, setelah Indonesia, penganggaran terbaik itu disusul oleh Filipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Singapura. "Jadi, proses penganggaran di DPR ini paling transparan. Tapi, DPR terus dimaki karena ada yang 'sakit perut' dengan DPR," tegas dia.

Sementara itu Kepala Badan Pengkajian DPR RI Jhonson Raja Gukguk mengatakan, keberhasilan DPR memperoleh nilai tertinggi dalam bidang anggaran itu adalah karena selalu mengikuti peraturan menteri.

"Kebetulan saya selaku Kua-sa Pengguna Anggaran taat pada undang-undang negara dan peraturan menteri keuangan. Tidak ada yang kita tutupi," kata dia.

Atas dasar itu lanjut dia, pihaknya selalu melakukan audiensi dengan berbagai LSM, termasuk dengan LSM Formapi. "Tadi pagi kami baru saja diskusi dengan LSM Formapi yang dipimpin Sebastian Salang. Kami minta kepada Sebastian Salang untuk menunjukkan dimana letak ketidaktransparan DPR," papar Jhonson. (kh)